BAB IX

KONTROVERSI PENANAMAN MODAL ASING (PMA) & UTANG LUAR NEGERI (ULN)

Oleh Dewi Triwahyuni

1997

INDONESIA KRISIS EKONOMI

Kondisi krisis diperburuk oleh praktek-praktek ekonomi yang tidak sesuai /tidak mengindahkan tata krama keadilan, seperti:

- Operasi perbankan yang sangat buruk
- nepotisme merajalela
- Utang swasta tidak transparan
- Korupsi melalui monopoli
- Spekulasi modal asing yang tinggi, dst.

PILIHAN SOLUSI :

PENANAMAN MODAL ASING (PMA)

UTANG LUAR NEGERI (ULN)

MASALAH BARU

KONDISI MAKRO EKONOMI INDONESIA

- Pasca 1997 (krisis ekonomi), kondisi makroekonomi Indonesia mengalami perbaikan, indikatornya adalah:
  - Penguatan kestabilan rupiah (mata uang nasional terhadap dolar)

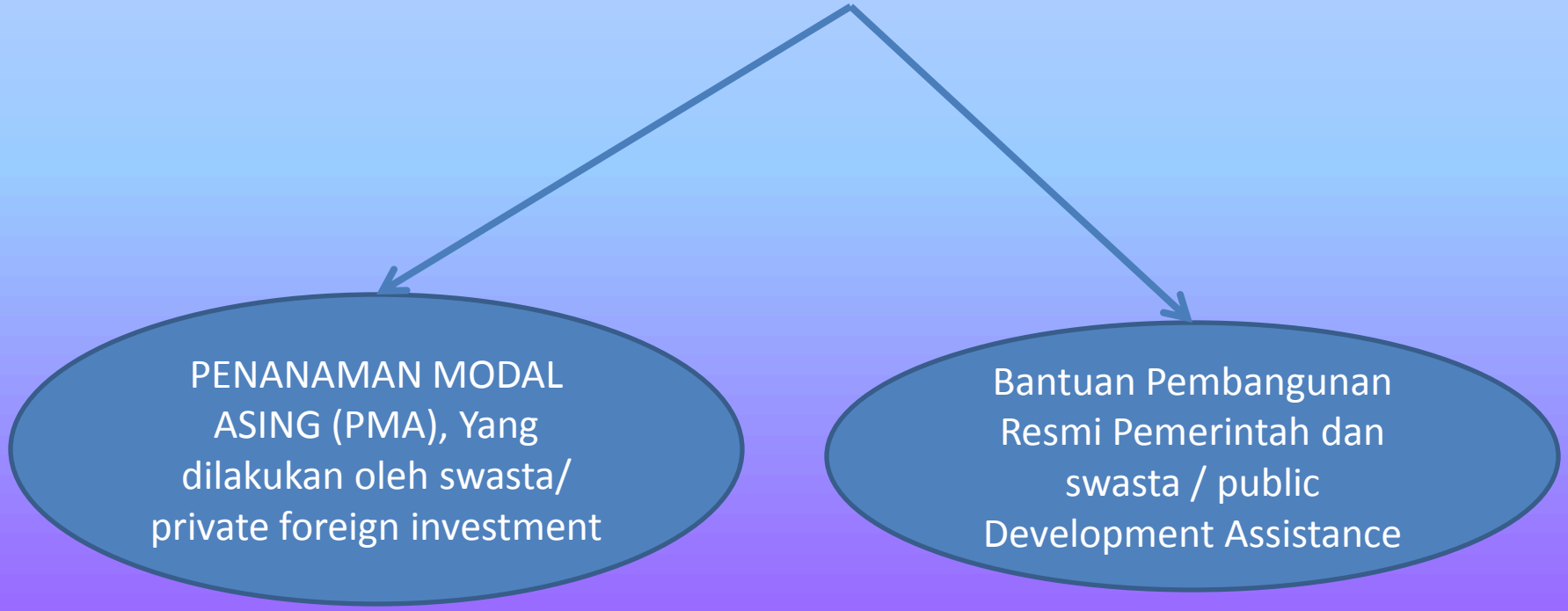
TAHUN	KISARAN / LEVEL
2003	Rp 10.000 / US dollar
2004 - 2005	Rp 8.500 / US dollar
2006 - 2007	Rp 9.000 – Rp 9.800 / US dollar

- Angka inflansi menurun :
  - 2002 : 10,5%
  - 2003 : 5,06%
- Tingkat Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) bisa ditekan dari 10,5% menjadi 8,34%
- Pertumbuhan ekonomi sedikit meningkat, meskipun baru diseputar 4%

- Selain ini kondisi makro ekonomi juga dipengaruhi oleh isu-isu atau masalah-masalah :
  1) Pembesaran korupsi dan malpraktek perbankan
  2) Masalah pengangguran
     - Sampai 2003, ada 40 juta orang (40%) dari angkatan kerja di Indonesia yang menganggur.
  3) Stabilitas politik

KONTROVERSI PENANAMAN MODAL ASING (PMA)

Arus modal Asing /keuangan Internasional Negara umumnya dalam dua bentuk :



PENANAMAN MODAL ASING (PMA), ***Private foreign investment*****, Contoh :**

- Foreign Direct Investment
- Deposito Asing pada Bank-bank Komersial nasional (Foreign Deposits/FD)
- Pinjaman Utang baik swasta/pemerintah
- Investasi dalam pasar uang, dalam pasar modal.

Bantuan Pembangunan Resmi Pemerintah dan swasta / *Public Development Assistance*

- Contohnya bisa berbentuk bantuan atau pinjaman luar negeri (*foreign Aid*) baik individual, multilateral melalui lembaga independen.

PERBANDINGAN

PMA / FDI :

- Biasanya menggunakan dana-dana investasi langsung untuk menjalankan kegiatan bisnis
- Meningkatkan lapangan pekerjaan
- Tingkat resiko paling kecil.

PDA / FA :

- Dikhawatirkan terjadi kebocoran dalam penggunaan dana pinjaman tersbut
- Kesulitan membayar bungan dan cicilan utang

Kontroversi seputar PMA adalah dalam hal kontribusinya dalam konteks pembangunan, yaitu antara yang positif (yang mendukung PMA) dan negatif (yang menentang PMA) :

MENDUKUNG (PMA memberikan sumbangan Positif) :	MENENTANG (PMA menberikan sumbangan negatif) :
Memenuhi kebutuhan tabungan (modal), devisa, pendapatan, dan keahlian manajemen.	PMA justru memperlebar kesenjangan
PMA berperan mengisi kekurangan sumber daya antara tingkat investasi yang ditargetkan dengan jumlah tabungan domestik yang dapat dimobilisasikan.	Terjadinya berbagai bentuk persaingan yang tidak sehat diantara pihak multinasional dengan pemerintah
Mengisi kesenjangan antara target jumlah devisa yang dibutuhkan dan hasil-hasil aktual devisa dari ekspor dan bantuan luar negeri.	Dalam jangka panjang, PMA justru mengurangi devisa karena adanya impor besar-besaran atas barang-barang setengah jadi dan barang modal dari perusahan multinasional tersebut, ditambah dengan mengirimkan kembali keuntungan ke negara asalnya.

MENDUKUNG (PMA memberikan sumbangan Positif) :	MENENTANG (PMA menberikan sumbangan negatif) :
Mengisi kesenjangan antara target penerima pajak pemerintah dan jumlah pajak aktual yang dapat dikumpulkan	Prakteknya adalah, pajak yang didapat sangat kecil dibandingkan dengan keuntungan yang didapat, akibat adanya fasilitas pemerintah terhadap investor asing tersebut.
Mengisi kebutuhan manajemen, teknologi, keterampilan atau *skill*.	Tidak semua dapat diberikan

PMA dalam hal ini diwakilkan oleh perusahaan-perusahaan multinasional (MNC), pada kenyataannya sepak terjangnya di Indonesia memunculkan banyak keberatan yang dapat dirangkum sebagai berikut (Todaro: 2006:166)

1) Implikasi positif yang diberikan bagi proses pembangunan pada kenyataanya tidak merata
2) Perusahaan multinasional umumnya menghasilkan barang/jasa yang sebenarnya tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan penduduk di negara berkembang.
3) Sumber daya domestik milik negara berkembang cenderung dialokasikan kepada proyek-proyek yang secara sosial tidak menguntungkan sehingga terjadi atau memperlebar ketimpangan.

4) Perusahaan Multinasional (kekuatan modal) sering mempengaruhi, menyuap, manipulasi berbagai kebijakan pemerintah di negara-negara berkembang.
5) Perusahaan Multinasional berpotensi besar merusak perekonomian dengan cara menekan timbulnya semangat wirausahawan lokal.
6) Kekhawatiran politis

KONTROVERSI UTANG LUAR NEGERI DI INDONESIA

Utang Luar Negeri (ULN) :

Adalah semua pinjaman konsensional dan bantuan pemerintah dalam bentuk uang atau barang yang secara umum ditujukan untuk mengalihkan sumber-sumber dari negara-negara kaya ke negara dunia ketiga, dengan tujuan utamanya pembangunan dan atau pemerataan pendapatan. (Todaro, 2000:175)

AKUMULASI ULN INDONESIA :

- 60 % ULN adalah utang sektor publik, dengan komposisi sebagai berikut:
  - 52% : utang pemerintah
  - 3,24% : Utang Bank Pemerintah
  - 4.13% : Utang BUMN
- Utang swasta 40,5%

Pengaruh ULN terhadap Kondisi Sosial-politik Negara :

1. Tingkat utang pemerintah yang tinggi, dapat meningkatkan resiko pelarian modal (*capital flight*)
2. Tingkat utang pemerintah yang didanai oleh ULN bisa menurunkan pengaruh secara politis (*bergaining position*) negara di pergaulan internasional

Aspek-aspek Kritis yang menyebabkan ULN memiliki implikasi serius terhadap Negara berkembang :

1. ULN datang dalam bentuk barang atau teknologi sehingga tidak fleksibel karena hanya bisa dipakai untuk program-program tertentu saja
2. Karena datang dalam bentuk tadi, maka kemungkinan yang muncul barang atau teknologi itu tidak lagi sesuai dengan program yang dipergunakan.

3. Biasanya ULN diikuti kesepakatan untuk menyertakan konsultan asing, yang tentu saja biayanya mahal jika dibandingkan dengan konsultan lokal
4. Biasanya disertai dengan kesepakatan-kesepakatan berbagai kebijakan seperti *Structural adjustment*.